

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

NOTA DINAS

Nomor: AK.03/80/D.I.M.EKON.3/07/2026

Yth : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Dari : Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan I T.A 2026
Tanggal : 10 April 2026

Dalam rangka implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan I T.A 2026 untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Adapun dokumen pendukung Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat diakses pada tautan berikut: https://tr.ee/PBUMNESDM2026_LapkinTW1.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Asisten Deputi Pengembangan
BUMN Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral



Gede Edy Prasetya
NIP 196906261994031002

Tembusan Yth.:
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang
Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan 2026	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</i>					
1.1	Indikator 1.1 Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Triliun	141,39	26,3	26,48	100,7
1.2	Indikator 1.2 Persentase penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persen	80	10	10	100
II	<i>Sasaran Program 2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas</i>					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tepat Sasaran	Persen	80	20	20	100
2.2	Indikator 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Hilirisasi – Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 dan Fase 2, serta New Smelter Aluminium di Mempawah	Persen	80	20	20	100
2.3	Indikator 2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pengembangan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati	Persen	80	20	20	100
2.4	Indikator 2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Program Strategis BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persen	80	20	20	100
III	<i>Sasaran Program 3. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas</i>					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	-	-

	Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral					
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	92	23	23	100

Kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Program 1. Meningkatnya Produktivitas BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
----------	---

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produktivitas BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian indikator jumlah realisasi Belanja Modal (Capex) BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Persentase Penyelesaian Penugasan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencapai target .

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Jumlah Realisasi

**Belanja Modal
BUMN Bidang
Energi dan Sumber
Daya Mineral**

Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran yang sangat krusial sebagai pilar utama dalam menjaga ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional. Dalam menjalankan fungsi strategis tersebut, investasi yang berkelanjutan melalui alokasi belanja modal (*capital expenditure*) menjadi motor penggerak utama untuk membangun serta memperbaiki infrastruktur vital, mulai dari eksplorasi sumber daya, pembangunan pembangkit listrik, hingga pengembangan jaringan distribusi. Optimalisasi penyerapan belanja modal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas operasional internal perusahaan, tetapi juga memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta pemerataan akses energi di seluruh wilayah Indonesia.

Belanja modal (*capital expenditure/capex*) merupakan indikator penting untuk menilai komitmen investasi BUMN dalam memperluas kapasitas usaha dan mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional. Tingkat realisasi *capex* mencerminkan efektivitas eksekusi program kerja dan keseriusan BUMN dalam berkontribusi terhadap prioritas pembangunan. Oleh karena itu, pengukuran atas persentase realisasi belanja modal menjadi relevan sebagai indikator kinerja utama bagi koordinasi Kemenko Perekonomian dalam mendorong akselerasi pertumbuhan sektor industri prioritas.

Upaya Pengembangan Usaha BUMN membutuhkan belanja modal (*capex*) yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendorong hal tersebut, dilakukan koordinasi dan monitoring pada BUMN bidang energi dan sumber daya mineral sehingga target realisasi belanja modal tahun 2026 sebesar Rp141,39 triliun berdasarkan *cascading* dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dapat tercapai.

BUMN bidang energi dan sumber daya mineral yang dikoordinasikan belanja modalnya yaitu pada BUMN yang memiliki kriteria diantaranya: merupakan BUMN dengan nilai aset besar dan kontribusi tinggi terhadap pendapatan negara, BUMN yang sudah tercatat di pasar modal (*go public*), BUMN sektor strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal, dan BUMN yang menerima PMN di tahun 2024 (sesuai UU nomor 19 tahun 2003). Rincian Holding BUMN beserta target yang dikoordinasikan antara lain:

- a. PT Pertamina (Persero) dengan target belanja modal sebesar Rp 68,23 Triliun
- b. PT PLN (Persero) dengan target belanja modal sebesar Rp 59,79 Triliun
- c. PT Mineral Industri Indonesia (Persero) dengan target belanja modal sebesar Rp 8,55 Triliun
- d. PT Pupuk Indonesia dengan target belanja modal sebesar Rp 4,82 Triliun

Dalam rangka memastikan bahwa investasi strategis tersebut berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang ESDM. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur komprehensif untuk mengevaluasi komitmen dan kemampuan BUMN sektor ESDM dalam mengeksekusi program-program kerja strategis yang telah direncanakan. Melalui pemantauan realisasi belanja modal ini, pemangku kepentingan dapat menilai tingkat keberhasilan implementasi proyek strategis nasional, modernisasi teknologi, serta kesiapan BUMN dalam mendukung transisi menuju energi bersih dan terbarukan sesuai dengan target jangka panjang pemerintah.

Untuk mencapai target realisasi *capex* BUMN bidang energi dan sumber daya mineral dilakukan melalui: kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi, dan penyusunan laporan dan/atau rekomendasi kebijakan pencapaian belanja modal BUMN bidang energi dan sumber daya mineral.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar Rp141,39 triliun dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada *cascading* dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Adapun target triwulan I sebesar Rp 26,3 Triliun

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Belanja Modal (Capex) BUMN bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah terealisasi sebesar Rp26,48 triliun atau mencapai 100,7% dari target Triwulan I tahun 2026 sebesar Rp26,3 triliun dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencapai target	Triliun	26,3	26,48	100,7% (Memuaskan)

Belanja Modal (Capex) BUMN bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencapai target merupakan *cascading non direct* dari Indikator Belanja Modal

Capex BUMN yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp141,39 Triliun. Penyampaian Data Capex BUMN Tahun 2026 telah dikirimkan melalui Deputi Bidang Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara, Badan Pengaturan BUMN kepada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan nomor surat S-6/DPN.BP/06/2026 tanggal 19 Juni 2026 dalam hal Penyampaian Data Capex BUMN untuk Target Tahun 2026 dan Realisasi Triwulan I Tahun 2026.

Berdasarkan dokumen perencanaan strategis BUMN tahun 2026, perencanaan belanja modal BUMN diarahkan pada infrastruktur pendukung proses bisnis seperti pembangunan kilang, smelter dan lainnya. Pembangunan-pembangunan infrastruktur ini diharapkan mampu menjadi stimulus geliat bisnis konstruksi, besi baja dan lainnya.

Realisasi Triwulan I 2026 ini didorong oleh koordinasi yang efektif antar *stakeholder* tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada triwulan I 2025. Kinerja triwulan I yang cukup baik dan diprediksikan kinerja BUMN bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terkait belanja modal akan terus stabil sehingga target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencapai target			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi dan sinkronisasi awal terkait target belanja modal (<i>Capex</i>) BUMN bidang ESDM (PT Pertamina, PT PLN, PT MIND ID, dan PT Pupuk Indonesia)	Terlaksana	1. Telah mengirimkan Surat nomor BUM.01/01/D.I.M.EKON/1/2026 tanggal 5 Januari 2026 kepada Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN terkait Permintaan Data Capex BUMN Tahun 2025 dengan rincian: - Realisasi Capex BUMN hingga Triwulan IV - 2025 - Update target realisasi Capex untuk Tahun 2026

			2. Telah mengirimkan surat nomor B/BUM.02/3/D.I.M.EKON .3/01/2026 tanggal 7 Januari 2026 kepada para Direktur Utama PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero), PT Pupuk Indonesia terkait Permohonan Data CAPEX (Target dan Realisasi) Triwulanan IV 2025 dan Target Tahun 2026. 3. Telah melaksanakan koordinasi secara berkelanjutan kepada BUMN bidang ESDM (PT MIND-ID, PT Pertamina, dan PT PLN) untuk mengetahui target belanja modal masing-masing BUMN bidang ESDM.
2.	Koordinasi dan sinkronisasi pembiayaan pada <i>Upgrading Existing</i> /RDMP Kilang	Tertunda	1. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembiayaan pada <i>Upgrading Existing</i> /RDMP baru mulai dilakukan pada TW II.
3.	Koordinasi dan sinkronisasi pembiayaan pada konstruksi tangki penyimpanan BBM.	Terlaksana	1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Pembangunan dan Penguatan Infrastruktur Storage Minyak PT Pertamina pada tanggal 12 Januari 2026. Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Pengembangan BUMN ESDM dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, BPH Migas, Danantara, PT Pertamina (Persero),

			PT PHE, PT KPI, dan PT PPN. Kesimpulan dan tindak lanjut dari kegiatan ini ialah: • Diperlukan kepastian pembagian peran yang jelas dalam proyek yang berkaitan. • Mendorong agar pemegang INU selain Peramina yang masih melakukan impor diesel agar dapat menyerap excess produk Pertamina • Perlu pembahasan lebih lanjut dengan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan ENergi Nasional yang in-charge dengan proyek pembangunan 18 kilang dan tangki tersebut.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Membuat bahan paparan target belanja modal 2026 PT MIND ID Triwulan I Tahun 2026
2. Membuat bahan paparan target belanja modal 2026 PT Pertamina Triwulan I Tahun 2026
3. Membuat bahan paparan target belanja modal 2026 PT PLN Triwulan I Tahun 2026
4. Membuat bahan paparan target belanja modal 2026 PT Pupuk Indonesia Triwulan I Tahun 2026
5. Penerbitan Surat Undangan Rapat Pembahasan Pembangunan dan Penguatan Infrastruktur Storage Minyak PT Pertamina Nomor : BUM.02/5/D.I.M.EKON.3/01/2026 tanggal 7 Januari 2026.
6. Bahan paparan Rapat Pembahasan Pembangunan dan Penguatan Infrastruktur Tangki Penyimpanan (Storage) Minyak PT Pertamina yang dipergunakan tanggal 12 Januari 2026
7. Penerbitan Nota Dinas mengenai Laporan Hasil Rapat Pembahasan Pembangunan dan Penguatan Infrastruktur Tangki Penyimpanan (Storage) Minyak PT Pertamina tertanggal 28 Januari 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dilaksanakannya rapat pembahasan di dalam kantor sehingga realisasi anggaran sampai dengan TW I sebesar Rp230.692.043 atau sebesar 35% dari pagu anggaran sebesar Rp653.329.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Dalam melakukan koordinasi awal untuk mengetahui target Capex BUMN bidang ESDM, terdapat BUMN yang kurang responsif dan tidak langsung memberikan informasi terkait hal tersebut.
2. Terdapat BUMN yang mau memberikan informasi target belanja modal (capex) namun memerlukan surat permintaan resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Lambatnya respon dari BUMN ataupun BP BUMN untuk memberikan data terkini realisasi Capex TW I Tahun 2026.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Membuat surat permintaan data target belanja modal (Capex) kepada BUMN bidang ESDM yang ditandatangani minimal di level eselon II.
2. Melakukan koordinasi dengan cara pendekatan persuasif dan berkelanjutan kepada tiap PIC masing-masing BUMN bidang ESDM, Kementerian/Lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi.
3. Optimalisasi sistem pendataan realisasi Capex secara triwulanan, termasuk validasi dan analisis tren pertumbuhan Capex berdasarkan sektor dan kelompok BUMN agar percepatan realisasi Capex menjadi lebih tepat sasaran.

1.2. Persentase penyelesaian penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disebutkan mengacu pada persentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang energi dan sumber daya mineral. Rincian dari penugasan yang menjadi dasar pada IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. PT Pertamina (Persero):

No.	Proyek/ Program	Pelaksana	Keterangan
1.	Penyediaan & Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)	Pertamina Patra Niaga	Penugasan <i>Public Service Obligation</i> (PSO) Pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat melalui penyediaan kuota JBT dan JBKP nasional yang bersubsidi/dikompensasi sesuai alokasi APBN.

2.	Penyediaan & Pendistribusian Isi Ulang LPG Tabung 3 kg	Pertamina Patra Niaga	Penugasan dari Pemerintah (Kementerian ESDM/BPH Migas) untuk memastikan kelancaran distribusi LPG bersubsidi secara tepat sasaran kepada masyarakat.
3.	Pembangunan Lembaga Penyalur BBM Satu Harga	Pertamina Patra Niaga	Program penugasan Pemerintah untuk mewujudkan keadilan energi dan penyamarataan harga BBM di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
4.	Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi Untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara	PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN)	Proyek penugasan untuk membangun jaringan gas kota (jargas) dan infrastruktur penyediaan energi bersih di wilayah IKN.
5.	Pengusahaan Panas Bumi di Wilayah Kerja Panas Bumi Kotamobagu	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE)	Penugasan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) panas bumi di WKP Kotamobagu, Sulawesi Utara, untuk mendukung transisi energi kelistrikan nasional.
6.	Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi	PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) & PT Pertamina Patra Niaga	Penugasan Pemerintah berdasarkan peta jalan (roadmap) pemanfaatan Bahan Bakar Gas (BBG/CNG) untuk transportasi guna menekan emisi dan impor BBM.
7.	Harga Gas Bumi Tertentu	PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN)	Kebijakan penugasan Pemerintah untuk menyediakan pasokan gas bumi dengan harga khusus bagi 7 sektor industri strategis guna mendukung daya saing industri nasional.
8.	Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM dan LPG	PT Pertamina Patra Niaga	Proyek peningkatan kapasitas infrastruktur hilir (Terminal BBM dan Terminal LPG) untuk memperkuat ketahanan stok energi nasional dan keandalan pasokan.
9.	<i>Upgrading Existing/Refinery Development Master Plan</i> (RDMP): RDMP Balongan, Dumai, Cilacap, Plaju dan Balikpapan	PT Kilang Pertamina Internasional (KPI)	Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk meningkatkan kapasitas pengolahan kilang, kompleksitas produk, dan standar kualitas bahan bakar hingga setara standar Euro V.

10.	Kilang Minyak Tuban (Ekspansi): GRR Tuban	PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) / PT Kilang Pertamina Internasional (KPI)	Proyek Strategis Nasional (PSN) Grass Root Refinery (GRR) berupa pembangunan kilang baru yang terintegrasi dengan kompleks petrokimia guna menekan impor BBM
11.	Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi Rumah Tangga	PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN)	Program penugasan Pemerintah (Jargas Rumah Tangga) untuk menyediakan energi gas pipa yang bersih, murah, dan aman bagi masyarakat, serta menekan beban subsidi LPG 3 kg.

Penugasan Pemerintah kepada Pertamina yang telah mendapatkan persetujuan RUPS berlaku dan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penerima subsidi yang telah ditetapkan Pemerintah. Indikator penyelesaian penugasan tersebut adalah terimplementasinya penyaluran subsidi dimaksud kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan penerima subsidi sampai dengan jangka waktu penugasan selesai (periodik per tahun).

2. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero):

No.	Kategori/ Penugasan	Uraian Penugasan	Dasar Hukum Penugasan
1.	Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) yang terdiri dari pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya	PLN ditugaskan untuk melaksanakan berbagai proyek strategis nasional (PSN) di bidang ketenagalistrikan yang tercantum di dalam RUPTL 2025-2034. Program PIK ini mencakup total 4.118 proyek yang keseluruhannya berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional.	1. Peraturan Presiden No.89/2025 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK). 2. Peraturan Presiden No.109/2020 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.
2.	Pelaksanaan program subsidi dan kompensasi listrik	PLN ditugaskan untuk menyalurkan subsidi dan kompensasi dari pemerintah untuk menjamin ketersediaan akses listrik yang	1. RUPTL PLN 2025–2034. 2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

		terjangkau. Hal ini dilakukan dengan memberikan tarif khusus bagi pelanggan rumah tangga miskin dan kelompok tertentu yang berhak menerima subsidi guna mengurangi beban hidup rakyat kecil.	315.K/TL.03/MEM.L/2025 tanggal 19 September 2025. 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016. 4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018. 5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2025. 6. Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2025.
3.	Pemenuhan kebutuhan listrik nasional yang terdiri dari program listrik pedesaan (Lisdes), program bantuan pasang baru listrik (BPBL) dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTsa)	1. Lisdes: Mempercepat pemerataan akses energi listrik dan mendukung pencapaian Rasio Elektrifikasi (RE) hingga 100% khususnya di wilayah 3T. 2. BPBL: Memastikan percepatan akses tenaga listrik bagi rumah tangga miskin di daerah pedesaan dan tertinggal. Penerima manfaat dapat langsung menggunakan listrik tanpa menanggung biaya awal. 3. PLTsa: PLN ditugaskan sebagai pihak <i>off taker</i> wajib yang bertanggung jawab menandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dan/atau membeli listrik dari pembangkit berbasis sampah	

Untuk mencapai target penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang energi dan sumber daya mineral ini akan dilakukan melalui: kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan penyusunan laporan dan/atau

rekomendasi kebijakan penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang energi dan sumber daya mineral. Indikator penyelesaian penugasan nomor 1 dan 2 adalah terimplementasinya penugasan pemerintah tersebut sesuai dengan jangka waktu penugasan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80% dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada *cascading* dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Adapun target triwulan I adalah sebesar 10%. Pemilihan pemecahan target triwulanan ini didasari oleh rencana pemecahan permasalahan dan kendala yang dihadapi pada tiap triwulan. Hingga Triwulan I Tahun 2026, Penyelesaian Penugasan Pemerintah BUMN bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencapai target yang telah terealisasi adalah sebesar 10% atau mencapai 100% dari target Triwulan I Tahun 2026 sebesar 10% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Persentase penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persen	10	10	100% (Memuaskan)

Pada Triwulan I, indikator Penyelesaian Penugasan BUMN Bidang ESDM memiliki target sebesar 10%, dan telah berhasil direalisasikan sebesar 10%, atau setara dengan 100% dari target triwulan I tahun 2026.

Capaian ini merupakan wujud nyata dari akselerasi kinerja BUMN sektor energi, khususnya dalam perampungan studi kelayakan proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dilakukan secara progresif serta ekspansi infrastruktur distribusi energi nasional. Tingkat akuntabilitas dari capaian ini telah divalidasi secara komprehensif melalui pelaporan resmi BUMN pelaksana, kesepakatan dalam risalah rapat koordinasi lintas kementerian, serta dokumen hasil evaluasi teknis yang diterbitkan oleh instansi pembina.

Capaian ini memberikan dampak positif berupa peningkatan akses energi bagi masyarakat terpencil dan percepatan transisi energi bersih, sekaligus menunjukkan efektivitas penugasan yang terkoordinasi.

Ke depan, proyeksi capaian per triwulan menunjukkan tren yang *on track*. Dengan capaian awal yang melampaui target, indikator ini diharapkan dapat melampaui target tahunan, serta memperkuat kontribusi BUMN terhadap program strategis nasional di sektor ESDM.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang

pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Identifikasi permasalahan penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP	Terlaksana	Telah dilaksanakannya Rapat Monitoring dan Evaluasi Kesiapan Pasokan BBM dan LPG Menjelang HBKN Nyepi dan Idul Fitri 2026 pada tanggal 5 Maret 2026 di Bandung yang melibatkan kementerian/lembaga maupun badan usaha terkait, dengan hasil sebagai berikut : • Kemenhub memprediksi sebanyak 143,9 juta orang akan melakukan perjalanan mudik selama periode libur Idul Fitri 2026, dimana kendaraan pribadi masih mendominasi pemudik yang akan menggunakan jalur tol terutama tol Jakarta-Cikampek yang menjadi titik kritis kepadatan setiap Idul Fitri. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan mudik agar dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. • PT. Pertamina (Persero) juga mempersiapkan diri dengan membentuk Satgas Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) 2026 guna memastikan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat yang meningkat sekaligus membangun kembali kepercayaan publik terhadap kualitas produk maupun layanan SPBU

			yang mengacu pada 4 pilar yaitu layanan energi (ketersediaan stok BBM, LPG dan avtur di seluruh titik lokasi pasokan), wilayah atensi (layanan difokuskan pada jalur tol, rest area, bandara dan tempat wisata), layanan promosi (khusus aplikasi MyPertamina), dan layanan tambahan. • Berdasarkan hasil koordinasi antara Pertamina, Jasa Marga, dan Korlantas POLRI diprediksi bahwa puncak arus mudik kali ini terbagi menjadi 2 periode yaitu puncak arus mudik I terjadi pada 13-15 Maret 2026 dan puncak arus mudik II pada 18-21 Maret 2026, sedangkan puncak arus balik I akan terjadi pada 24-25 Maret 2026 dan puncak arus balik II pada 28-29 Maret 2026. • Secara nasional, PT. Pertamina (Persero) memproyeksikan <i>demand</i> BBM dibandingkan kondisi normal (rerata penjualan Januari 2026) naik sekitar 12% untuk gasoline dan turun sekitar 14,5% untuk gasoil, sedangkan untuk LPG diprediksi meningkat 4%, <i>demand</i> avtur meningkat 2,8% serta kerosene juga meningkat 4,2%. Kondisi serupa juga diprediksikan terjadi pada Regional Jawa Bagian Barat, dimana konsumsi LPG untuk rumah tangga meningkat 2,86%, gasoline diprediksi meningkat 9,6%, dan gasoil turun 27,6%. Penurunan gasoil
--	--	--	---

			ini dikarenakan berkurangnya aktivitas logistik akibat pembatasan mobilisasi kendaraan logistik selama libur Idul Fitri 2026. • Guna menghadapi kondisi tersebut selama periode arus mudik maupun arus balik, PT. Pertamina (Persero) telah mensiagakan seluruh infrastruktur yang meliputi 7.885 SPBU, 6.777 Pertashop, 6.662 Agen LPG (5.795 PSO dan 867 Non PSO) 557 SPBE (643 PSO dan 114 Non PSO), dan 223 Agen Minyak Tanah (199 PSO dan 24 Non PSO). PT. Pertamina (Persero) juga menyediakan layanan energi pendukung di jalur potensial meliputi jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama, berupa SPBU 24 jam sebanyak 2.074 unit dan terdapat di 73 area tol, agen LPG siaga 6.300 unit, 96 layanan modular BBM dan 62 kios Pertamina siaga di sejumlah 64 titik lokasi, Motorist/PDS BBM 200 unit, PDS Bright Gas 2.701 outlet, mobil tangki <i>stand by</i> 200 unit, dan 41 unit Serambi MyPertamina. • Khusus Regional Jawa Bagian Barat seluruh infrastruktur yang disiagakan meliputi 1.620 SPBU, 439 Pertashop, 2.331 Agen LPG (2.093 PSO dan 238 NPSO), 206 SPBE (176 PSO dan 30 Non PSO) dan 2 Agen Minyak Tanah (1 PSO dan 1 Non PSO). Guna memastikan layanan terhadap
--	--	--	--

			masyarakat juga disediakan layanan energi pendukung berupa SPBU 24 jam sebanyak 427 unit, agen LPG siaga sebanyak 2.180 unit, layanan BBM dan Kiosk Pertamina Siaga 18 titik, motorist/PDS BBM 50 titik, PDS bright gas 563 agen, mobil tangki stand by 26 unit, dan 11 unit serambi MyPertamina yang berada di beberapa titik lokasi rest area serta tempat wisata. Selain itu, terdapat layanan tambahan berupa <i>service car, towing car, rescue car support</i> PT PAR di Serambi Km 57A Cikampek dan Km 43A Banten. • Satgas RAFI Regional Jawa Bagian Barat juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah terutama dalam pemberian peringatan dini guna mencegah potensi terjadinya bencana alam khususnya pada wilayah atensi yaitu meliputi potensi longsor (Sukabumi, Kab Tangerang, Subang, Garut, Sumedang, Kuningan, Majalengka, jalur selatan Tasikmalaya, Ciamis), potensi banjir (Jakarta Timur, Kab Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung, Ciamis), dan potensi jalan amblas (Sukabumi, Sumedang). • Berdasarkan proyeksi selama pelaksanaan Satgas RAFI 2026, hampir keseluruhan produk baik gasoline maupun gasoil dapat mencapai level
--	--	--	---

			ketahanan stok dari aturan BPH Migas yaitu 23 hari, kecuali untuk solar meskipun secara operasional masih aman karena level stok solar tetap berada di atas target minimum operasional. • Kementerian ESDM telah menerbitkan seluruh perizinan impor BBM bagi PT Pertamina dan badan usaha lainnya sebagai langkah antisipatif untuk menjamin ketersediaan pasokan energi menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. Penerbitan izin ini diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional Satgas RAFI serta memastikan distribusi BBM kepada masyarakat tetap terjaga dengan aman dan lancar selama periode peningkatan konsumsi. • Sebagai kesimpulan, secara umum pasokan dan penyaluran BBM serta LPG menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2026 berada dalam kondisi aman dan lancar. Namun demikian, terdapat potensi gangguan rantai pasok akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi lalu lintas di Selat Hormuz, dimana saat ini terdapat dua kapal tanker milik Pertamina yang masih tertahan sehingga perlu terus dimonitor dampaknya terhadap jadwal pengiriman energi ke dalam negeri.
--	--	--	---

2	Identifikasi permasalahan penyediaan dan pendistribusian Isi Ulang LPG Tabung 3 Kg	Terlaksana	Telah dilaksanakannya Rapat Monitoring dan Evaluasi Kesiapan Pasokan BBM dan LPG Menjelang HBKN Nyepi dan Idul Fitri 2026 pada tanggal 5 Maret 2026 di Bandung yang melibatkan kementerian/lembaga maupun badan usaha terkait, dengan hasil sebagai berikut : • PT. Pertamina (Persero) juga mempersiapkan diri dengan membentuk Satgas Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) 2026 guna memastikan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat yang meningkat sekaligus membangun kembali kepercayaan publik terhadap kualitas produk maupun layanan SPBU yang mengacu pada 4 pilar yaitu layanan energi (ketersediaan stok BBM, LPG dan avtur di seluruh titik lokasi pasokan), wilayah atensi (layanan difokuskan pada jalur tol, rest area, bandara dan tempat wisata), layanan promosi (khusus aplikasi MyPertamina), dan layanan tambahan. • Secara nasional, PT. Pertamina (Persero) memproyeksikan <i>demand</i> BBM dibandingkan kondisi normal (rerata penjualan Januari 2026) naik sekitar 12% untuk gasoline dan turun sekitar 14,5% untuk gasoil, sedangkan untuk LPG diprediksi meningkat 4%, <i>demand</i> avtur meningkat 2,8% serta kerosene juga meningkat 4,2%. Kondisi serupa juga
---	--	------------	--

			diprediksikan terjadi pada Regional Jawa Bagian Barat, dimana konsumsi LPG untuk rumah tangga meningkat 2,86%, gasoline diprediksi meningkat 9,6%, dan gasoil turun 27,6%. Penurunan gasoil ini dikarenakan berkurangnya aktivitas logistik akibat pembatasan mobilisasi kendaraan logistik selama libur Idul Fitri 2026. • Guna menghadapi kondisi tersebut selama periode arus mudik maupun arus balik, PT. Pertamina (Persero) telah menyiagakan seluruh infrastruktur yang meliputi 7.885 SPBU, 6.777 Pertashop, 6.662 Agen LPG (5.795 PSO dan 867 Non PSO) 557 SPBE (643 PSO dan 114 Non PSO), dan 223 Agen Minyak Tanah (199 PSO dan 24 Non PSO). PT. Pertamina (Persero) juga menyediakan layanan energi pendukung di jalur potensial meliputi jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama, berupa SPBU 24 jam sebanyak 2.074 unit dan terdapat di 73 area tol, agen LPG siaga 6.300 unit, 96 layanan modular BBM dan 62 kios Pertamina siaga di sejumlah 64 titik lokasi, Motorist/PDS BBM 200 unit, PDS Bright Gas 2.701 outlet, mobil tangki <i>stand by</i> 200 unit, dan 41 unit Serambi MyPertamina. • Berdasarkan proyeksi selama pelaksanaan Satgas RAFI 2026, hampir keseluruhan
--	--	--	--

			produk baik gasoline maupun gasoil dapat mencapai level ketahanan stok dari aturan BPH Migas yaitu 23 hari, kecuali untuk solar meskipun secara operasional masih aman karena level stok solar tetap berada di atas target minimum operasional. • Kementerian ESDM telah menerbitkan seluruh perizinan impor BBM bagi PT Pertamina dan badan usaha lainnya sebagai langkah antisipatif untuk menjamin ketersediaan pasokan energi menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. Penerbitan izin ini diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional Satgas RAFI serta memastikan distribusi BBM kepada masyarakat tetap terjaga dengan aman dan lancar selama periode peningkatan konsumsi. • Sebagai kesimpulan, secara umum pasokan dan penyaluran BBM serta LPG menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2026 berada dalam kondisi aman dan lancar. Namun demikian, terdapat potensi gangguan rantai pasok akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi lalu lintas di Selat Hormuz, dimana saat ini terdapat dua kapal tanker milik Pertamina yang masih tertahan sehingga perlu terus dimonitor dampaknya terhadap jadwal
--	--	--	--

			pengiriman energi ke dalam negeri.
3.	Identifikasi permasalahan penyelesaian pembangunan Kilang <i>Existing</i> /RDMP	Terlaksana	Dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional Kemenko Perekonomian mendorong percepatan penyelesaian pembangunan kilang, salah satunya pembangunan kilang <i>Refinery Development Master Plan</i> (RDMP) Refinery Unit (RU) V Balikpapan yang telah diresmikan oleh Presiden pada 12 Januari 2026. Proyek RDMP RU V Balikpapan dibangun dan dikelola oleh PT. Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) selaku anak usaha PT Kilang Pertamina Indonesia (KPI) yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total pembiayaan proyek sebesar 7,4 miliar USD. Proyek ini dinilai mampu menciptakan <i>multiplier effect</i> dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 24.000 pekerja, penyerapan TKDN sebesar 35%, dan kontribusi PDB nasional mencapai Rp. 514 triliun; Pembangunan RDMP RU V Balikpapan dapat meningkatkan kemampuan kilang mengolah <i>crude oil</i> dari 260 kbpd (<i>kilo barrel per day</i>) menjadi 360 kbpd, meningkatkan kompleksitas kilang dari NCI 3,7 menjadi 8,0, meningkatkan kualitas produk dari EURO II menjadi setara EURO V, meningkatkan <i>Yield Valuable Product</i> Sebesar 91,8% dari sebelumnya sebesar 75,3%, meningkatkan produk BBM (gasoline, diesel dan avtur) total 339 kbpd dari sebelumnya 197 kbpd, produk LPG menjadi 384

			ktpa dari sebelumnya 48 ktpa, dan menambah produk baru yaitu petrokimia dan sulfur total sebesar 253 ktpa;
4.	Koordinasi dan sinkronisasi percepatan penyelesaian pembangunan Kilang Minyak Tuban (GRR Tuban)	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait Dukungan Sovereign Guarantee Proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban pada tanggal 22 Januari 2026 di Surabaya yang melibatkan kementerian/lembaga maupun badan usaha terkait. Berdasarkan hasil FGD tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut: a. Diperlukan dukungan pemerintah dalam pelaksanaan proyek GRR Tuban melalui penjaminan pemerintah kepada BUMN untuk meningkatkan kelayakan dan daya tarik proyek bagi investor dan lembaga pembiayaan, mengingat skala investasi dan kompleksitas pembiayaan yang tinggi. b. Bentuk penjaminan pemerintah terhadap proyek GRR Tuban yang dimungkinkan yaitu dalam bentuk penjaminan melalui penugasan pemerintah, dengan memenuhi syarat penetapan penugasan melalui Perpres Penugasan sesuai ketentuan peraturan

			perundang-undangan yang berlaku. c. Inisiasi penyusunan Perpres Penugasan dimaksud diusulkan berasal dari Kementerian ESDM selaku K/L teknis atau BP BUMN atau Danantara selaku badan pembina BUMN. Sebagai tindak lanjutnya, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang ESDM akan menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka pembahasan dukungan regulasi Perpres Penugasan Pembangunan Proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban dengan melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, BP BUMN, Danantara serta PT Pertamina (Persero). d. Guna mendorong pemberian dukungan G2G yang dibutuhkan proyek GRR Tuban akan diakomodir dalam pembahasan rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kamar Dagang Indonesia (KADIN), negara-negara mitra seperti China, negara-negara BRICS, dan negara lainnya yang
--	--	--	---

			berpotensi sebagai mitra. 2. Telah dilaksanakan rapat pembahasan dukungan pembiayaan proyek Pembangunan GRR Tuban pada tanggal 25 Februari 2026 dengan hasil sebagai berikut: • Nilai investasi Proyek GRR Tuban yang sangat besar, diperlukan kejelasan mengenai struktur pendanaan, baik melalui pinjaman, pembiayaan berbasis ekuitas, maupun kombinasi keduanya. Dalam hal pembiayaan berbasis ekuitas, terdapat kemungkinan kebutuhan Penyertaan Modal Negara (PMN), termasuk melalui dukungan pemerintah. • Kementerian ESDM sudah memberikan penugasan pembangunan dan pengoperasian Kilang Tuban kepada Pertamina dalam Kepmen ESDM 807K/12/MEM/2016, yang nantinya mungkin dapat diusulkan untuk menjadi Perpres Penugasan guna memudahkan dalam mendapatkan penjaminan pemerintah. • Bappenas menekankan bahwa diperlukan kajian risiko pembiayaan secara komprehensif untuk menentukan
--	--	--	---

			opsi pendanaan yang paling feasible dan dapat diimplementasikan dalam waktu dekat. Perlu juga untuk melihat apakah proyek ini memungkinkan untuk mendapatkan pinjaman dari pemerintah atau fokus pada pembiayaan berbasis ekuitas yang juga membutuhkan PMN. • Posisi Rosneft sebagai mitra proyek menghadapi tantangan akibat dinamika geopolitik dan adanya sanksi dari Amerika Serikat yang berdampak pada akses pembiayaan internasional. Kondisi tersebut membuat diperlukannya opsi alternatif, termasuk kemungkinan penyesuaian struktur kerja sama. • Diperlukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri guna mempertimbangkan aspek kebijakan politik luar negeri, hubungan diplomatik, serta dinamika kerja sama internasional, termasuk posisi Indonesia dalam kerja sama ekonomi global seperti BRICS dan kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat. • Pendekatan yang dilakukan saat ini adalah melihat dan
--	--	--	---

			menunggu, sembari menyiapkan langkah mitigasi apabila diperlukan penyesuaian terhadap struktur kemitraan proyek. • Mandiri sekuritas sebagai penasihat keuangan proyek telah melakukan komunikasi dengan sejumlah lembaga keuangan internasional untuk menjajaki kemungkinan partisipasi dalam pembiayaan proyek. • Saat ini pendekatan lebih difokuskan pada lembaga keuangan di Tiongkok dan Hongkong, mengingat sebagian besar kontraktor Engineering, Procurement, and Construction (EPC) berasal dari entitas Tiongkok serta adanya potensi dukungan dari Export Credit Agency (ECA) dan bank komersial Tiongkok. Selain itu, terdapat juga peluang untuk memperluas sumber pendanaan melalui lembaga keuangan di kawasan Timur Tengah, sejalan dengan posisi Indonesia sebagai anggota BRICS. • Beberapa hal yang menjadi pertimbangan calon pemberi pinjaman, antara lain kejelasan risiko sanksi Rosneft sebagai mitra proyek, kepastian aliran ekuitas dari
--	--	--	---

			sponsor proyek, kejelasan offtaker, kesiapan lahan, dukungan sponsor selama masa konstruksi, serta dukungan pemerintah terhadap tata kelola pembiayaan proyek. • Ke depan, diperlukan pendekatan government to government (G2G) untuk memperluas akses pembiayaan, termasuk melalui kerja sama dengan pemerintah Tiongkok dan lembaga keuangan internasional. • Diperlukan pendalaman terhadap kelayakan ekonomi dan struktur pendanaan Proyek GRR Tuban, melalui koordinasi antara Pertamina, PRPP, Mandiri Sekuritas, dan Danantara guna menentukan opsi pembiayaan yang paling feasible serta dukungan pemerintah yang diperlukan. • Terkait dengan pembahasan mengenai risiko geopolitik dan opsi alternatif kerja sama dan pendanaan Proyek GRR Tuban, termasuk kemungkinan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan internasional, akan diadakan rapat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
--	--	--	---

			3. Telah dilaksanakan FGD Dukungan pembiayaan pembangunan GRR Tuban pada tanggal 11 Maret 2026 di Jakarta dengan hasil sebagai berikut: • Terdapat kebutuhan dukungan pembiayaan khususnya dari luar negeri bagi proyek pembangunan kilang GRR Tuban, dimana ada 3 negara mitra yang dinilai potensial sebagai <i>lenders</i> antara lain RRC, negara-negara Timur Tengah, dan Malaysia. Oleh karena itu diperlukan dukungan penuh dari Kementerian Luar Negeri yang berperan strategis sebagai perantara G2G untuk mendukung proyek ini dalam memperoleh <i>lenders</i> dari bank komersial negara-negara mitra tersebut. • Berdasarkan hasil pertemuan pemerintah Indonesia dengan Rusia pada Desember 2025 terbuka opsi untuk menggabungkan pembiayaan (<i>blended financing</i>) untuk proyek ini dengan negara-negara lain seperti China. Terkait pengenaan <i>secondary sanction</i> terhadap Rosneft hingga saat ini masih tetap berjalan
--	--	--	--

			mengingat US maupun negara Uni Eropa tidak berkenan memberikan relaksasi untuk energi. Untuk penjelasan detail dan pembahasan lebih lanjut mengenai isu <i>sanction</i> dimaksud perlu mengundang Direktorat Keamanan Perdamaian Internasional, Direktorat Kerjasama Intra-Kawasan dan Antar Kawasan Amerika dan Eropa, Direktorat Amerika I Kementerian Luar Negeri. • Kementerian Luar Negeri menjelaskan bahwa saat ini diberlakukan pengetatan syarat untuk <i>refinery project financing</i> dari <i>National Development and Reform Commission</i> China. Untuk peluang penggunaan <i>local currency transaction</i> sudah pernah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri bersama Bank Indonesia dengan China. China memiliki skala prioritas tersendiri untuk <i>refinery project financing</i>. Kementerian Luar Negeri pada prinsipnya bersedia memfasilitasi pembahasan bilateral dengan China bersama-sama K/L terkait dengan menitikberatkan pada urgensi <i>refinery</i>
--	--	--	---

			<i>project financing</i> GRR Tuban ini - Selain itu, menurut pandangan Kementerian Luar Negeri perlu dilakukan <i>benchmarking</i> mengenai praktik kerjasama pembiayaan proyek <i>refinery</i> yang sudah pernah dilakukan oleh negara China dan Brunei Darusalam sehingga kita dapat memperoleh <i>best practicenya</i> untuk dapat diterapkan pada proyek GRR Tuban. Adapun terkait dengan <i>secondary sanction</i> dipandang perlu pembahasan lebih lanjut dengan mengundang juga KBRI Washington DC. - Sejak Juni 2025 sudah ada kesepakatan (MoU) antara Danantara Indonesia dengan <i>Russian Direct Investment Fund (RDIF)</i> terkait investasi sebesar 2 miliar EURO untuk kedua negara, namun belum ditindaklanjuti hingga saat ini. Perlu dipastikan kembali hal ini mungkin dapat dipertimbangkan sebagai salah satu opsi/alternatif pembiayaan bagi proyek GRR Tuban. - Negara-negara Timur Tengah seperti UEA dan Qatar dinilai potensial sebagai mitra dalam
--	--	--	--

			pembiayaan proyek ini mengingat kedua negara tersebut pada dasarnya bersifat terbuka untuk kerjasama bilateral yang dibuktikan dengan adanya beberapa kerjasama investasi yang sudah berjalan antara Indonesia dengan kedua negara tersebut.
5.	Koordinasi dan sinkronisasi percepatan penyelesaian kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Rencana Pembangunan Jaringan Gas Bumi: Dampak Tambahan Anggaran dari APBN pada tanggal 2 Juni 2026 di Jakarta dengan hasil sebagai berikut: • Terkait ABT yang disetujui oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp14,462 triliun (dari usulan sebesar Rp16,655 triliun) akan difokuskan untuk mendanai sejumlah proyek strategis, yaitu Tambahan Jargas Rumah Tangga (MYC 2026 – 2028) sebanyak 959.100 Sambungan Rumah Tangga (SR) dengan alokasi sebesar Rp3,351 triliun, Pipa Transmisi Gas Cirebon – Bandung (MYC 3 tahun) sepanjang 132 km dengan alokasi sebesar Rp0,854 triliun, Pipa Transmisi Gas Semarang – Solo – DIY (MYC 3 tahun) sepanjang 148 km dengan alokasi sebesar Rp0,88 triliun, Infrastruktur

			Listrik Pedesaan sebanyak 2.682 lokasi dengan alokasi sebesar Rp9,345 triliun, dan Pemetaan Potensi dan Pengawasan EBT pada 34 provinsi dengan alokasi sebesar Rp30 miliar. • Proyek pembangunan pipa distribusi gas rute Tegal – Cilacap akan dilaksanakan sepanjang 124 kilometer dengan jalur pipa yang melintasi empat wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Tegal, Brebes, Banyumas, dan Cilacap. Nilai • Berdasarkan konfirmasi dari PGN bahwa telah dilakukan koordinasi awal secara <i>business to business</i> antara PGN dengan PAM JAYA terkait kolaborasi Jargas PGN dengan infrastruktur air bersih di Jakarta. • Sebagai kesimpulan dan tindak lanjut, untuk alokasi ABT ini bersifat tahun jamak (Multi Years Contract) yang difokuskan pada penyelesaian output keseluruhan di akhir masa kontrak (tidak memiliki alokasi target capaian per tahun).
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan menghadiri Rapat Koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang membahas dan

memaparkan mengenai stimulus ekonomi berupa penyediaan kebutuhan BBM menjelang Ramadhan dan Idul Fitri yang melibatkan BUMN terkait, yaitu PT Pertamina (Persero) dan penyelesaian pembayaran subsidi dan kompensasi listrik yang melibatkan BUMN terkait, yaitu PT PLN (Persero).

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dilaksanakannya rapat pembahasan di dalam kantor sehingga realisasi anggaran sampai dengan TW I sebesar Rp230.692.043 atau sebesar 35% dari pagu anggaran sebesar Rp653.329.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Proses koordinasi awal untuk menghimpun data target dan realisasi berjalan lambat karena beberapa BUMN kurang responsif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.
2. Terdapat beberapa BUMN yang bersikap kooperatif, namun mensyaratkan adanya legalitas permohonan data melalui surat dinas resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan mendatang agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Menerbitkan surat resmi permintaan data target dan realisasi penugasan pemerintah kepada seluruh BUMN bidang ESDM terkait, dengan penandatanganan minimal di tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II).
2. Membangun hubungan kerja yang lebih erat melalui pendekatan persuasif, personal, dan berkelanjutan langsung kepada para PIC di masing-masing BUMN ESDM demi mempercepat alur pertukaran informasi.

2

Sasaran Program 2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Produktivitas BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian indikator yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tepat Sasaran;
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Hilirisasi – Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 dan Fase 2, serta New Smelter Aluminium di Mempawah;
3. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pengembangan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati;
4. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Program Strategis BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan

Latar Belakang

Penegakan kebijakan subsidi BBM agar tepat sasaran merupakan langkah strategis untuk menjaga efektivitas belanja negara, memperkuat ketahanan fiskal, serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Dari sisi ekonomi, penyaluran subsidi

**Pengendalian
Kebijakan Subsidi
Bahan Bakar
Minyak Tepat
Sasaran**

yang tepat sasaran akan mengurangi kebocoran anggaran, meningkatkan efisiensi penggunaan APBN, serta memastikan manfaat subsidi diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Sementara itu, dari sisi bisnis, pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan subsidi akan menciptakan persaingan usaha yang lebih adil, mencegah praktik penyelewengan dan penyelundupan, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan. Dengan demikian, subsidi energi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi juga menjadi pendorong stabilitas ekonomi dan peningkatan daya saing nasional .

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan penyaluran subsidi BBM yang lebih tepat sasaran sebagai bagian dari reformasi tata kelola subsidi energi. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan bahwa manfaat subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Berbagai langkah yang telah dilakukan meliputi penguatan regulasi, digitalisasi sistem distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi, penyempurnaan basis data penerima subsidi, integrasi data antar-kementerian/lembaga, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan subsidi. Asisten Deputi Pengembangan BUMN bidang ESDM berkomitmen dan konsisten melakukan koordinasi dengan K/L dan badan usaha terkait dalam upaya penertiban program subsidi BBM tepat sasaran..

Adapun tujuan kebijakan pengendalian subsidi BBM tepat sasaran antara lain:

- Menjamin subsidi BBM tepat sasaran dengan memastikan penyalurannya hanya kepada masyarakat dan sektor yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara melalui pengurangan kebocoran dan penyalahgunaan subsidi sehingga manfaatnya dapat dioptimalkan bagi kepentingan publik.
- Memperkuat tata kelola dan ketahanan energi nasional melalui pengawasan yang lebih baik, penegakan hukum yang tegas, serta distribusi BBM bersubsidi yang lebih transparan dan akuntabel

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Bahan terkait Pengendalian Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tepat Sasaran.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80% dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN Bidang ESDM yang diperoleh melalui penilaian 1 (satu) tahap dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses. Adapun target triwulan I sebesar 20%.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tepat Sasaran . Dalam Rangka pengendalian subsidi BBM tepat sasaran telah terealisasi sebesar 20 atau mencapai 100% dari target Triwulan I Tahun 2026 sebesar 20% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1. IKU-2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tepat Sasaran	Persen	20	20	100% (Memuaskan)

Triwulan I indikator Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tepat Sasaran memiliki target sebesar 20% dan telah berhasil direalisasikan sebesar 20%, atau setara dengan 100% dari target triwulan I tahun 2026. Capaian ini merupakan upaya Asdep Pengembangan BUMN Bidang ESDM dalam mendukung tertibnya program subsidi BBM tepat sasaran, dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan/hal-hal apa saja yang menjadi perhatian dan tantangan dari K/L dan BUMN yang kemudian akan dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pengambil kebijakan. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan mengadakan rapat pembahasan dengan K/L, BUMN, dan perusahaan swasta yang berkaitan dengan penyaluran BBM bersubsidi. Juga dilakukan koordinasi yang intensif dengan instansi Aparat Penegak Hukum agar penertiban subsidi BBM tepat sasaran dapat ditegakkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tepat Sasaran			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Sinkronisasi DTSEN lintas K/L Penetapan kriteria penerima subsidi	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan Rapat Penertiban dan Penegakkan Hukum Penyalahgunaan Penggunaan Subsidi BBM dalam rangka Penghematan APBN pada tanggal 5 Januari 2026. Pada rapat kali ini dapat disampaikan bahwa a. Ditemukan berbagai modus, seperti

			penggunaan banyak QR Code dan nomor polisi, pemanfaatan surat rekomendasi (XStar) secara ilegal, hingga penggunaan BBM subsidi oleh sektor industri, b. Audit BPKP menunjukkan adanya potensi kerugian negara yang besar akibat subsidi tidak tepat sasaran dan pembelian BBM oleh perusahaan tidak berizin, c. Diperlukan revisi Perpres 191 (BBM) dan Perpres 104 (LPG) dalam penyertaan kriteria konsumen, kuota, dan mekanisme pembatasan, khususnya untuk Pertalite yang belum jelas dan detail, sehingga menimbulkan celah spekulasi dan penyalahgunaan, d. Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, dan KESDM telah melakukan berbagai langkah preventif seperti QR Code, verifikasi volume (Vervol/Verdes), data cleansing, audit rutin, dan sanksi administratif, e. Bareskrim menunjukkan komitmen kuat dengan peningkatan penyelesaian perkara hingga P21 untuk seluruh perusahaan yang terlibat dan arahan tegas Kapolri bahwa tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan BBM subsidi.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Risalah Rapat Penertiban dan Penegakkan Hukum Penyalahgunaan Penggunaan Subsidi BBM dalam Rangka Penghematan APBN.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dilaksanakannya rapat pembahasan di dalam kantor sehingga realisasi anggaran sampai dengan TW I sebesar Rp60.723.654 atau sebesar 21% dari pagu anggaran sebesar Rp290.915.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi yang mengatur distribusi hilir BBM dengan BUMN terkait, mengenai data penerima subsidi dan teknis pemberian.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Tim teknis Asdep Pengembangan BUMN ESDM telah melakukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi yang mengatur distribusi hilir BBM dengan BUMN terkait, mengenai data penerima subsidi dan teknis pemberian.

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Hilirisasi – Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 dan Fase 2, serta New Smelter Aluminium di Mempawah

Latar Belakang

Hilirisasi sumber daya alam merupakan salah satu program prioritas Pemerintah dalam rangka meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri, memperkuat struktur industri nasional, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung kemandirian industri strategis. Sebagai tindak lanjut kebijakan pelarangan ekspor bijih bauksit, Pemerintah mendorong percepatan pembangunan industri pengolahan bauksit menjadi alumina dan aluminium di dalam negeri. Salah satu proyek strategis tersebut adalah pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah yang merupakan kerja sama antara PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM). Selain penyelesaian SGAR Fase 1, pemerintah juga mendorong pengembangan SGAR Fase 2 serta pembangunan New Smelter Aluminium di Mempawah guna memperkuat ekosistem hilirisasi bauksit yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah isu strategis yang memerlukan penyelesaian melalui koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan pemangku kepentingan terkait. Beberapa isu tersebut antara lain penyelesaian tumpang tindih lahan proyek, pengembangan infrastruktur logistik melalui Pelabuhan Kijing, penyediaan lahan untuk landfill area dan hauling road, dukungan perizinan dan tata ruang, serta kesiapan infrastruktur pendukung untuk pengembangan SGAR Fase 2 dan New Smelter Aluminium. Penyelesaian berbagai isu tersebut menjadi faktor penting dalam menjamin keberlanjutan operasional proyek serta mendukung peningkatan kapasitas industri aluminium nasional.

Untuk mendukung percepatan hilirisasi bauksit, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian melalui penyelenggaraan rapat koordinasi, monitoring dan

evaluasi, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan strategis bersama Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak terkait. Koordinasi tersebut difokuskan pada percepatan penyelesaian isu lintas sektor, penyelarasan kebijakan, serta pemantauan tindak lanjut hasil rapat guna memastikan kelancaran pelaksanaan SGAR Fase 1, pengembangan SGAR Fase 2, dan pembangunan New Smelter Aluminium di Mempawah.

Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan fungsi koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung percepatan penyelesaian isu strategis serta implementasi kebijakan hilirisasi bauksit melalui pengembangan SGAR Fase 1, SGAR Fase 2, dan New Smelter Aluminium di Mempawah.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80% dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN Bidang ESDM yang diperoleh melalui penilaian 1 (satu) tahap dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses. Adapun target triwulan I sebesar 20%

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Hilirisasi - Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 dan Fase 2, serta New Smelter Aluminium di Mempawah telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 100% dari target triwulan I tahun 2026 sebesar 20% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
2. IKU-2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Hilirisasi – Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 dan Fase 2, serta New Smelter Aluminium di Mempawah	Persen	20	20	100% (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Hilirisasi – Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 dan Fase 2, serta New Smelter Aluminium di Mempawah			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Identifikasi permasalahan Pengembangan <i>Smelter Grade Alumina Refinery</i> (SGAR) Fase I dan Fase II, serta New Smelter Aluminium	Terlaksana	1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Progress Penyelesaian Tumpang Tindih Lahan ANTAM Proyek SGAR pada tanggal 9 Januari 2026. Rakor dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil mediasi ANTAM dan PT PAM yang diadakan oleh BPN Mempawah. 2. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengembangan Terminal Kijing Mempawah pada tanggal 12 Maret 2026 yang membahas mengenai upaya peningkatan program hilirisasi bauksit dan aluminium melalui pengembangan terminal Kijing menjadi Pelabuhan Kijing. Pengembangan ini mencakup peningkatan kapasitas dan fasilitas pelabuhan agar mampu mendukung kebutuhan logistik

			bahan baku (seperti bauksit dan alumina) serta distribusi produk akhir, sekaligus menjamin efisiensi rantai pasok dan keberlanjutan operasional proyek secara keseluruhan.
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Deputi Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Nomor: BUM.05/14/D.I.M.EKON/01/2026 tanggal 28 Januari 2026 Hal Penyampaian Risalah Rapat Tanggal 9 Januari 2026 tentang Rapat Koordinasi Progress Penyelesaian Tumpang Tindih Lahan ANTAM pada Proyek SGAR.
2. Penerbitan Nota Dinas Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Deputi Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Nomor: BUM.05/38/D.I.M.EKON.3/04/2026 tanggal 6 April 2026 Hal Laporan Rapat Koordinasi Pengembangan Terminal Kijing Mempawah.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dilaksanakannya rapat pembahasan di dalam kantor sehingga realisasi anggaran sampai dengan TW I sebesar Rp22.869.410 atau sebesar 8% dari pagu anggaran sebesar Rp291.075.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Masih diperlukan percepatan penyelesaian isu tumpang tindih lahan pada proyek SGAR melalui koordinasi antar pemangku kepentingan.
2. Sinkronisasi kebijakan dan dukungan lintas Kementerian/Lembaga dalam pengembangan Pelabuhan Kijing masih terus dilakukan untuk mendukung rantai pasok proyek hilirisasi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala untuk memonitor tindak lanjut penyelesaian permasalahan lahan dan mendorong percepatan penyelesaiannya.
2. Mengoordinasikan penyelarasan kebijakan dan rencana pengembangan Pelabuhan Kijing dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN terkait guna mendukung operasional proyek SGAR dan pengembangan industri aluminium terintegrasi.

2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pengembangan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati

Latar Belakang

Dalam menghadapi tantangan swasembada energi dan mendorong transisi energi menjadi energi bersih, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral juga melakukan pengawalan terhadap pengembangan bahan bakar nabati (biofuel) melalui Pembangunan Kilang Bioethanol yang akan dilakukan oleh PT Pertamina (persero), melalui Kilang Pertamina Internasional, Pertamina Patra Niaga, dan Pertamina New and Renewable Energy (PNRE). Penggunaan bioethanol dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, mendukung perekonomian lokal, dan meningkatkan ketahanan energi dengan mengurangi ketergantungan pada minyak bumi karena mudah diintegrasikan ke infrastruktur BBM. Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, sekaligus mendukung komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi karbon dan transisi menuju energi bersih.

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80% dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN Bidang ESDM yang diperoleh melalui penilaian 1 (satu) tahap dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses. Adapun target Triwulan I sebesar 20%

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Bioethanol Sebagai Bahan Bakar Nabati telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 100% dari target Triwulan I Tahun 2026 sebesar 20% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pengembangan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati	Persen	20	20	100% (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pengembangan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Identifikasi dan pendalaman teknis permasalahan dalam pengembangan Bioethanol sebagai bahan bakar nabati dengan Kementerian/Lem baga dan BUMN terkait	Terlaksana	1. Melaksanakan Rapat Tindak Lanjut Pengembangan Bioethanol pada 3 Februari 2026 membahas KBLI dan ekosistem bioethanol. 2. Melaksanakan Rapat Percepatan Pengembangan Bioetanol pada 24 Februari 2026 untuk membahas Progres Akomodasi KBLI 19206 dalam Permen NSPK, KemenESDM dan Sistem OSS, Update progress revisi PMK dan Perdirjen Bea Cukai, Tata Niaga Bahan Baku Bioetanol, dan Update Roadmap Bioetanol. 3. Melaksanakan FGD Strategi Percepatan Penerapan Penggunaan Bahan Bakar Bioetanol di Indonesia pada 5 Maret 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menghadiri Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penyampaian Aduan PT Pertamina Patra Niaga ke Satgas P2SP Terkait Fasilitas Pembebasan Cukai Etil Alkohol untuk Bahan Bakar Nabati pada 22 Januari 2026..

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dilaksanakannya rapat pembahasan di dalam kantor sehingga realisasi anggaran sampai dengan TW I sebesar Rp125.004.854 atau sebesar 43% dari pagu anggaran sebesar Rp289.820.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Proses penyelarasan regulasi yang mendukung pengembangan bioethanol, antara lain terkait KBLI, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Online Single Submission (OSS), serta ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai, masih memerlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
2. Masih diperlukan pendalaman terhadap aspek teknis dan keekonomian pengembangan bioethanol, termasuk mekanisme penyediaan bahan baku, tata niaga, insentif fiskal, serta model bisnis yang dapat mendukung percepatan implementasi program.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan III agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi lanjutan dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta BUMN terkait untuk menyelaraskan substansi regulasi dan kebijakan pengembangan bioethanol.
2. Mendorong percepatan penyelesaian isu lintas sektor, antara lain terkait penyesuaian KBLI, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), sistem Online Single Submission (OSS), serta regulasi di bidang kepabeanan dan cukai guna mendukung pengembangan ekosistem bioethanol.
3. Melakukan pendalaman terhadap aspek teknis dan keekonomian pengembangan bioethanol melalui forum diskusi, rapat koordinasi, dan pengumpulan masukan dari kementerian/lembaga, BUMN, serta pemangku kepentingan terkait sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan.

2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Program Strategis BUMN Bidang Energi

Latar Belakang

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait program strategis BUMN bidang energi dan sumber daya mineral. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut

**dan Sumber
Daya Mineral**

selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Kebijakan yang dikoordinasikan dalam rangka mencapai Persentase Efektivitas Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:

- Peningkatan peran dan pengembangan usaha BUMN bidang energi dan sumber daya mineral seperti Pertamina, PLN, Pupuk Indonesia, MIND ID.
- Peningkatan kinerja BUMN melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- Penyelesaian kendala dan tantangan pengembangan usaha BUMN di bidang energi seperti listrik, bahan bakar minyak, gas, dan pupuk serta sumber daya mineral dan batubara.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN Bidang ESDM diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80% dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN Bidang ESDM yang diperoleh melalui penilaian 1 (satu) tahap dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses. Adapun target triwulan I sebesar 20%.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Program Strategis BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 100% dari target triwulan I Tahun 2026 sebesar 20% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Program Strategis BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persen	20	20	100% (Memuaskan)

Kegiatan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Program Strategis BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan terkait program strategis dan rencana kerja PT Pertamina, PT PLN, PT Mind.Id dan PT Pupuk Indonesia. pada Triwulan I 2026 telah dilaksanakan rapat bersama PT Pertamina beserta anak usahanya, PT PLN beserta anak usahanya, PT Mind.Id beserta anak usahanya, dan PT Pupuk Indonesia beserta anak usahanya,

Adapun sebagian besar isu strategis BUMN tersebut antara lain terkait dukungan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pengembangan perusahaan yang telah direncanakan mulai dari perizinan pembangunan, pengadaan lahan, pengadaan peralatan, alokasi anggaran/pembiayaan pembangunan hingga fase konstruksi proyek, terutama terkait adanya rencana pembangunan maupun pengembangan proyek.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Program Strategis BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Identifikasi permasalahan terkait program strategis dan rencana kerja PT Pertamina, PT PLN, PT Mind Id dan PT Pupuk Indonesia untuk tahun 2026	Terlaksana	1. Penyelenggaraan FGD mengenai dukungan sovereign guarantee proyek GRR Tuban pada 21-22 Januari 2026 di Hotel Sheraton Surabaya yang menyimpulkan bahwa masih diperlukannya dukungan pemerintah dalam pelaksanaan proyek GRR Tuban melalui penjaminan pemerintah kepada BUMN untuk meningkatkan kelayakan dan daya tarik proyek bagi investor dan lembaga pembiayaan, mengingat skala investasi dan kompleksitas pembiayaan yang tinggi. Bentuk penjaminan pemerintah terhadap proyek GRR Tuban yang dimungkinkan yaitu dalam bentuk penjaminan melalui penugasan pemerintah, dengan memenuhi syarat penetapan penugasan melalui Perpres Penugasan sesuai ketentuan peraturan perUUan yang berlaku. Inisiasi penyusunan Perpres Penugasan dimaksud diusulkan berasal dari Kementerian ESDM selaku K/L teknis atau BP BUMN atau Danantara selaku badan pembina BUMN. Guna mendorong pemberian dukungan

			G2G yang dibutuhkan proyek GRR Tuban akan dibahas tersendiri dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kemenko Perekonomian dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kamar Dagang Indonesia (KADIN), negara-negara mitra seperti China, negara-negara BRICS, <i>National Development Bank</i>, negara-negara Timur Tengah dan negara lainnya yang berpotensi sebagai mitra. 2. Penyelenggaraan FGD mengenai dukungan pembiayaan proyek GRR Tuban pada 11 Maret 2026 di Park Hyatt Jakarta yang memperoleh kesimpulan sebagai berikut : a) terdapat kebutuhan dukungan pembiayaan khususnya dari luar negeri bagi proyek pembangunan kilang GRR Tuban, dimana ada 3 negara mitra yang dinilai potensial sebagai <i>lenders</i> antara lain RRC, negara-negara Timur Tengah, dan Malaysia. b) Berdasarkan hasil pertemuan pemerintah Indonesia dengan Rusia pada Desember 2025 terbuka opsi untuk menggabungkan pembiayaan (<i>blended financing</i>) untuk proyek ini dengan negara-negara lain seperti China. Terkait pengenaan <i>secondary sanction</i> terhadap Rosneft hingga saat ini masih tetap berjalan mengingat US maupun negara Uni Eropa tidak berkenan memberikan relaksasi untuk energi. c) Kementerian Luar Negeri menjelaskan bahwa saat ini diberlakukan pengetatan syarat untuk <i>refinery project financing</i> dari <i>National Development and Reform Commission</i> China. Untuk peluang penggunaan <i>local currency transaction</i> sudah pernah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri bersama Bank Indonesia dengan China. China memiliki skala prioritas
--	--	--	--

			tersendiri untuk <i>refinery project financing</i>. Kementerian Luar Negeri pada prinsipnya bersedia memfasilitasi pembahasan bilateral dengan China bersama-sama K/L terkait dengan menitikberatkan pada urgensi <i>refinery project financing</i> GRR Tuban ini. d) menurut pandangan Kementerian Luar Negeri perlu dilakukan <i>benchmarking</i> mengenai praktik kerjasama pembiayaan proyek <i>refinery</i> yang sudah pernah dilakukan oleh negara China dan Brunei Darusalam sehingga kita dapat memperoleh <i>best practicenya</i> untuk dapat diterapkan pada proyek GRR Tuban. e) Sejak Juni 2025 sudah ada kesepakatan (MoU) antara Danantara Indonesia dengan <i>Russian Direct Investment Fund (RDIF)</i> terkait investasi sebesar 2 miliar EURO untuk kedua negara, namun belum ditindaklanjuti hingga saat ini. Perlu dipastikan kembali hal ini mungkin dapat dipertimbangkan sebagai salah satu opsi/alternatif pembiayaan bagi proyek GRR Tuban. f) Negara-negara Timur Tengah seperti UEA dan Qatar dinilai potensial sebagai mitra dalam pembiayaan proyek ini mengingat kedua negara tersebut pada dasarnya bersifat terbuka untuk kerjasama bilateral yang dibuktikan dengan adanya beberapa kerjasama investasi yang sudah berjalan antara Indonesia dengan kedua negara tersebut. 3. Pelaksanaan rapat koordinasi terkait Pengembangan Bisnis Trading Hub, Bunkering Hub, dan CPE melalui Pengembangan Terminal (storage) di Batam pada tanggal 11 Februari 2026, yang menginventarisir adanya kendala sebagaimana disampaikan oleh Pertamina Energy Terminal antara
--	--	--	--

			lain : a) Tingginya tarif <i>Value Added Tax</i> (VAT/PPN) dan <i>Permanent Establishment</i> (PE) di Indonesia jika dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia yang menyebabkan kawasan Batam menjadi kalah bersaing dengan kedua negara tetangga tersebut. Dalam hal ini, diperlukan adanya penyesuaian tarif PPN dan PE agar setara dengan Singapura dan Malaysia perlu dipertimbangkan oleh pemangku kebijakan, meskipun berpotensi menurunkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, namun kebijakan tersebut dipandang dapat membuka peluang penerimaan baru dari pengembangan bisnis energi termasuk pertumbuhan UMKM dan penciptaan lapangan kerja. b) Adanya kendala operasional, antara lain ketentuan <i>cabotage law</i> dan penggunaan kapal sarana prasarana untuk kegiatan sandar lepas kapal. BP Batam berpandangan bahwa diperlukan kejelasan serta <i>legal standing</i> mengenai status Pulau Sambu dan Tanjung Uban, hingga saat ini Pulau Sambu belum diusulkan sebagai KEK maupun PSN serta belum masuk dalam KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut dan penyesuaian regulasi untuk mendukung pengembangan bisnis energi di kawasan tersebut. Di sisi lain, Pertamina Holding dan Danantara akan melakukan kajian serta pembahasan lebih lanjut mengenai kelayakan potensi keberlanjutan rencana pengembangan bisnis energi tersebut. 4. Penyelenggaraan FGD mengenai Tindak Lanjut Pemanfaatan Aset
--	--	--	---

			Negara yang Diserahkan kepada PT Timah Tbk serta pending issue Revisi Permendag 9/2025 pada 9 Januari 2026 di Discovery SCBD Jakarta, yang merekomendasikan penyelesaian masalah sebagai berikut : a. Terkait dengan debottlenecking logam timah hasil lelang yang tidak dapat dijual/dipasarkan karena berbenturan dengan Permendag 9/2025, Terdapat 2 pandangan yang berbeda dari K/L mengenai mekanisme yang dapat digunakan untuk pemanfaatan barang rampasan negara yang diserahkan ke PT Timah (khususnya logam timah), yaitu menurut DJKN sebaiknya menggunakan mekanisme lelang, sedangkan menurut DJBC dapat dilakukan melalui mekanisme hibah. Dalam rangka mengakomodir optimalisasi pemanfaatan barang rampasan negara sebagai aset negara, maka diperlukan revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. Untuk memonitor progresnya, Kemenko Perekonomian akan berkoordinasi lebih lanjut dengan DJKN Kementerian Keuangan. Barang hasil lelang dan penggalangan satgas dapat dicatatkan sebagai inventory PT. Timah dengan melampirkan risalah lelang/dokumen pendukung lainnya agar dapat dijual/dipasarkan oleh PT
--	--	--	---

			Timah dan secara prinsip bisa juga diakomodir dalam RKAB PT Timah Tahun 2026 sebagai alokasi ekspor sehingga tidak perlu melakukan revisi Permendag 9/2025. Terkait pembayaran royalti akan tetap menjadi kewajiban bagi PT Timah terkait dengan penjualan logam timah hasil lelang. b. Terkait dengan usulan PT Timah Industri tentang ketentuan kandungan Sn paling tinggi menjadi 99,85% pada kriteria teknis dalam Permendag 9/2025, Kementerian Perdagangan masih menunggu respon dan jawaban dari Kementerian Perindustrian. Hal ini akan dibahas dalam rapat koordinasi tindak lanjut bersama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan DJBC.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Undangan FGD mengenai Dukungan Sovereign Guarantee Proyek GRR Tuban Nomor : BUM.02/6/D.I.M.EKON.3/01/2026 tanggal 15 Januari 2026.
2. Bahan paparan FGD mengenai Dukungan Sovereign Guarantee Proyek GRR Tuban.
3. Penerbitan Risalah Rapat/FGD mengenai Dukungan Sovereign Guarantee Proyek GRR Tuban tertanggal 22 Januari 2026.
4. Penerbitan Surat Undangan FGD mengenai Dukungan Pembiayaan Proyek GRR Tuban Nomor BUM.02/35/D.I.M.EKON.3/03/2026 tanggal 4 Maret 2026.
5. Bahan paparan FGD mengenai Dukungan Pembiayaan Proyek GRR Tuban.
6. Penerbitan Nota Dinas Laporan Hasil FGD mengenai Dukungan Pembiayaan Proyek GRR Tuban Nomor: BUM.02/34/D.I.M.EKON.3/03/2026 tanggal 17 Maret 2026.
7. Penerbitan Surat Undangan Rapat Koordinasi terkait Tindak Lanjut Pengembangan Bisnis Trading Hub, Bunkering Hub, dan CPE melalui Pembangunan Terminal (Storage) di Batam Nomor: BUM.02/20/D.I.M.EKON.3/02/2026 tanggal 9 Februari 2026.

8. Bahan paparan rapat terkait Tindak Lanjut Pengembangan Bisnis Trading Hub, Bunkering Hub, dan CPE melalui Pembangunan Terminal (Storage) di Batam.
9. Penerbitan Nota Dinas Laporan Hasil Rapat Tindak Lanjut Pengembangan Bisnis Trading Hub, Bunkering Hub, dan CPE melalui Pembangunan Terminal (Storage) di Batam Nomor: BUM.02/20/D.I.M.EKON.3/02/2026 tanggal 13 Februari 2026.
10. Penerbitan Surat Undangan FGD mengenai Pemanfaatan Aset Hasil Sitaan yang Diserahkan oleh Kejaksaan Agung ke PT. Timah, Tbk dan Revisi Permendag 9/2025 Nomor: BUM.02/2/D.I.M.EKON.3/01/2026 tanggal 6 Januari 2026.
11. Bahan paparan FGD mengenai Pemanfaatan Aset Hasil Sitaan yang Diserahkan oleh Kejaksaan Agung ke PT. Timah, Tbk dan Revisi Permendag 9/2025.
12. Penerbitan Nota Dinas Laporan Hasil FGD Pemanfaatan Aset Hasil Sitaan yang Diserahkan oleh Kejaksaan Agung ke PT. Timah, Tbk dan Revisi Permendag 9/2025 Nomor: BUM.05/5/D.I.M.EKON.3/01/2026 tanggal 14 Januari 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan rapat secara daring dan kerja sama pembiayaan dengan mitra BUMN sehingga realisasi anggaran sampai dengan TW I sebesar Rp230.692.043 atau sebesar 35% dari pagu anggaran sebesar Rp653.329.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapat perubahan struktur organisasi/manajemen khususnya pada BUMN bidang ESDM yang berdampak memperlambat pengambilan keputusan serta progres pelaksanaan program strategis BUMN bidang ESDM.
2. Belum dilibatkannya unit kerja terkait dari perwakilan negara-negara mitra yang potensial menjadi partner dalam pembiayaan pelaksanaan program strategis khususnya terkait rencana pembangunan GRR Tuban.
3. Adanya perbedaan persepsi dari masing-masing stakeholder (terutama DJBC dan DJKN Kemenkeu) mengenai mekanisme untuk optimalisasi pemanfaatan aset rampasan negara yang diserahkan ke PT. Timah, Tbk.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Monitoring dan koordinasi dengan manajemen baru pada BUMN bidang ESDM guna pembahasan keberlanjutan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan program strategis BUMN bidang ESDM.
2. Diusulkan perlu dilakukan benchmarking dan/atau rapat koordinasi bersama perwakilan negara-negara mitra yang potensial secara keseluruhan guna mendukung pembiayaan program strategis BUMN bidang ESDM, khususnya proyek pembangunan GRR Tuban.
3. Penyelenggaraan rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian isu debottlenecking dan persepsi mengenai mekanisme optimalisasi pemanfaatan aset rampasan negara yang diserahkan ke PT. Timah, Tbk.

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Produktivitas BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian indikator yaitu: Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan

Layanan

Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Sasaran strategis Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas berfokus pada tugas dan fungsi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencakup: (a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asdep Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survei ini terdiri atas 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4 dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kategori puas. Adapun triwulan I belum dilaksanakan survei.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral **belum dapat diketahui realisasi kinerjanya** dan baru dapat diketahui pada akhir Triwulan I 2026, karena pengukurannya dilaksanakan dua kali dalam setahun sekali, yaitu pada akhir semester I dan akhir semester II pada akhir tahun berjalan.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
-------------------------	--------	--------	-----------	-----------

IKU-3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	indeks	-	-	-
--	--------	---	---	---

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Persiapan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian BUMN Bidang ESDM Semester I 2026	Tertunda dan Digeser	Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Periode Semester I Tahun 2026 dilakukan pada akhir periode semester I, yaitu di bulan Juli 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga dalam penyusunan rekomendasi yang lebih komprehensif
2. Memberikan pelayanan optimal kepada stakeholder dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dilaksanakannya rapat pembahasan di dalam

kantor sehingga realisasi anggaran sampai dengan TW I sebesar Rp230.692.043 atau sebesar 35% dari pagu anggaran sebesar Rp653.329.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang perlu ditingkatkan Kembali antar K/L.
2. Diperlukan strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan BUMN Bidang ESDM.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Peran aktif pegawai memanfaatkan komunikasi informal dan formal untuk mendorong koordinasi dan sinkronisasi.
2. Peningkatan kualitas layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan BUMN Bidang ESDM melalui peningkatan kualitas SDM.

4

Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan oleh pencapaian indikator yaitu: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1. Persentase

Pelaksanaan

**Rencana Aksi RB
Asisten Deputi
Bidang
Pengembangan
Badan Usaha Milik
Negara Bidang
Energi dan Sumber
Daya Mineral**

Latar Belakang

Terwujudnya tata kelola Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang baik merupakan sasaran strategis yang berfokus pada perspektif *learning and growth* dan merupakan turunan dari sasaran strategis perspektif *learning and growth* level kedeputian yakni Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Rencana Aksi Asisten Deputi terkait pemenuhan:

1. Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai
2. Tingkat Maturitas SPIP
3. Nilai SAKIP
4. Indeks Perencanaan Pembangunan
5. Tingkat Digitalisasi Arsip

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92% dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN Bidang ESDM yang diperoleh melalui penilaian 1 (satu) tahap dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses. Adapun target triwulan I sebesar 23%.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah terealisasi sebesar 23% atau mencapai 100% dari target triwulan I Tahun 2026 sebesar 23% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persen	23	23	100% (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU	Terlaksana	Telah disusun dan ditetapkan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU Keasdepan

			Pengembangan BUMN bidang ESDM
2	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Telah disusun konsep Laporan Kinerja Triwulan I
3	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Aplikasi SRIKANDI telah dimanfaatkan secara optimal, yang ditunjukkan dengan sebagian besar dokumen yang diterbitkan oleh Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang ESDM telah diproses melalui aplikasi tersebut.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program kerja dan capaian kinerja di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang ESDM.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara intensif dengan unit kerja terkait dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan revidi dan penyempurnaan dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Manual IKU, Renja, dan Laporan Kinerja berdasarkan masukan dari unit pembina maupun hasil evaluasi internal.
4. Penyusunan SKP untuk seluruh pegawai di Keasdepan Pengembangan BUMN bidang ESDM.
5. Melakukan sosialisasi dan pemantauan pemanfaatan aplikasi SRIKANDI kepada pegawai di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang ESDM guna mendukung tertib administrasi persuratan secara elektronik.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dilaksanakannya rapat pembahasan di dalam kantor sehingga realisasi anggaran sampai dengan TW I sebesar Rp230.692.043 atau sebesar 35% dari pagu anggaran sebesar Rp653.329.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Keterbatasan waktu karena penyusunan dokumen administrasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tugas substantif dan penugasan pimpinan yang bersifat dinamis; dan
2. Masih diperlukan peningkatan pemahaman dan konsistensi pemanfaatan aplikasi SRIKANDI oleh seluruh pegawai agar implementasi tata naskah dinas elektronik dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Menyusun jadwal kerja dan target penyelesaian dokumen secara lebih terstruktur, disertai pemantauan progres secara berkala agar penyusunan dokumen tetap berjalan sesuai target.
2. Optimalisasi pembagian beban kerja;
3. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan penggunaan aplikasi SRIKANDI secara berkala serta melakukan monitoring terhadap kepatuhan penggunaan aplikasi dalam proses persuratan; dan
4. Melaksanakan rapat koordinasi monitoring rencana aksi RB.

Jakarta, 1 April 2026

Asisten Deputi Pengembangan BUMN
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral



Gede Edy Prasetya